

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum Pajak merupakan pungutan dari masyarakat Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak dapat balas jasa secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengelolaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang yang berwenang pemungutnya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan pusat dan pembangunan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya adalah dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Karena itu kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada daerah untuk memberdayakan segala potensi perekonomian yang tersedia. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan diantaranya adalah kewenangan pemungutan pajak. Pajak daerah merupakan kontribusi terpenting bagi daerah yang dapat dipaksakan pemungutannya bagi Orang Pribadi atau Badan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perubahan undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi pedoman kebijakan pajak daerah sehingga diharapkan pembinaan pajak daerah dan pajak pusat dapat saling melengkapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain bertujuan untuk penyempurnaan dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang pada hakikatnya terjadi pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak baru untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan sesuai dengan *Tax capacity* yang ada, penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada masyarakat. Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan yang sebelumnya dalam undang-undang No 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dikategorikan sebagai Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang kemudian di ubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain disebabkan pengambilan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bersifat pajak, penataan kembali pajak ini bertujuan untuk lebih memberikan perhatian pada masalah dan pelestarian lingkungan sebagai dampak kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara (Zuraida, 2013 : 32).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi sebagai berikut:

a. Sistem pelaporan

Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan sistem pelaporan adalah wajib pajak mengisi formulir SPTPD, setelah wajib pajak mengisi SPTPD wajib pajak langsung membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan ke bank Riau Kepri atau kantor pos berdasarkan SPTPD.

b. Sistem TOL/pemungutan di jalan.

Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan sistem TOL adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Badan Pendapatan Daerah. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL). Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu, petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kuantan Singingi:

1. Pos Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Pos Cerenti, Kecamatan Cerenti.
3. Pos Singingi Hilir, Kecamatan Singingi Hilir.
4. Pos Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat.

c. Sistem Wajib Pungut (WAPU)

Sistem wajib pungut ini dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di kabupaten Kuantan Singingi seperti pemborongan pembuatan jalan di desa, setiap rekanan harus menunjukkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, jika tidak ada bukti pembayaran maka dikenakan pajak dengan ketentuan rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak, berdasarkan kontrak tersebut wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD, jika tidak menyampaikan SPTPD maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**

No	Nama Perusahaan / CV
1	CV. Mandiri Global
2	CV. Bintang Laksamana
3	CV. Aufa Karya
4	CV. Rosela
5	CV. Surya Cipta Sejati
6	CV. Putra Kandis
7	CV. Pantai Gading
8	CV. Sungai Paing
9	CV. Jariah
10	CV. Ladon Kontraktor
11	CV. Mentari Pagi
12	CV. Iswara Corp
13	CV. Bintang Laksamana
14	CV. Naufal
15	CV. Panca Putra Mandiri
16	CV. Bina Pratam
17	CV. Defrindo Primatana
18	CV. Bangun Cipta Lestari
19	CV. Dilla Maju Mandiri
20	CV. Trio Gemilang
21	CV. Widandi Taltemb
22	CV. Den Utama
23	CV. Jasa Sarana Putra
24	CV. Pondam Tigo Jural
25	CV. Rantau Sakti
26	CV. Sungai Gemuruh
27	CV. Bintang Utama
28	CV. Braja Santana
29	CV. Putra Mandiri
30	CV. Putri Kencana
31	CV. Berkah Abadi
32	CV. Bukit Intan
33	CV. Panca Putra
34	CV. Lima Satu
35	CV. Dita Jaya Lestari
36	CV. Bangun Mandiri Persada

**Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi.**

Usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjumpai sedikit kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang masih relatif rendah, luas areal galian mineral bukan logam dan batuan yang tidak cukup luas, jumlah tonase galian yang sedikit, banyaknya masyarakat yang tidak tahu cara pendataan, pendaftaran dan pemungutan yang membuat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Kuantan Singingi tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga membuat pendapatan asli daerah menjadi tidak meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui prosedur bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dengan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul : **“Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penulisan yaitu bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama
- d. Dengan penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama di bangku kuliah.

### **1.4. Metode Penulisan**

#### **1.4.1. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beralamat di kompleks perkantoran PEMDA Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

#### **1.4.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 April 2017 sampai 31 Oktober 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 1.4.3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder.

Data sekunder adalah Data di peroleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.4.4. Teknik pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi Adalah Pengamatan Secara Langsung Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian Penulis.

#### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data yang bersumber dari buku-buku yang ada di Perpustakaan.

#### 3. Wawancara/interview

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.

### 1.4.5. Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan di jabarkan pada bab-bab berikut ini

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pada bab ini akan di uraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan singingi, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak mineral bukan logam dan batuan, dasar hukum pengambilan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, objek pajak, bukan objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, izin pengambilan, DPP, tarif dan cara perhitungan pajak Mineral

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan logam dan batuan, dan lain-lain mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang ditemukan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**